

Rakornas Adeksi Lahirkan Deklarasi Bogor

written by | 08/12/2016



SELURUH peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia (Adeksi), bertekad menyatukan aspirasi dan idenya dalam Deklarasi Bogor, Kamis (8/12/2016)

Menurut Ketua Umum Adeksi, Ir. H. Armuji, ada 8 butir Deklarasi Bogor dengan tema Penguatan tupoksi DPRD dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Isi Deklarasi Bogor diantaranya. DPRD Kota berkomitmen untuk mendorong pelaksanaan pembangunan secara strategis taktis dan berkelanjutan dengan mengedepankan pengelolaan lingkungan secara arif dan cermat agar cita-cita berdirinya negara sebagai bangsa yang berdaulat, maju, adil dan sejahtera dapat diwujudkan.

“DPRD Kota berkomitmen memastikan bahwa haluan pembangunan tidak semata berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan lingkungan, akan tetapi pembangunan harus dilaksanakan secara selaras dan sinergis antara kebutuhan pertumbuhan ekonomi dengan jaminan keberlangsungan lingkungan,” kata Armuji.

Ketiga, lanjut Armuji, DPRD Kota berkomitmen dalam melaksanakan fungsi legislasinya membentuk Peraturan Daerah dan kebijakan lainnya bersama eksekutif akan melakukan pengawalan terhadap pengaturan tata ruang yang berorientasi kepada pembangunan berwawasan lingkungan dan kota hijau sebagai implementasi dari pembangunan berkelanjutan yang sehat dan peka terhadap kondisi penanggulangan risiko bencana (PRB).

“DPRD Kota berkomitmen dalam menjalankan fungsi anggarannya akan memastikan bahwa perencanaan keuangan daerah (APBD) agar mencerminkan terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan

dan kota hijau secara memadai. Kelima DPRD Kota berkomitmen akan bersikap terbuka atas Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang dengan membuka partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya sehingga dapat melahirkan Peraturan Daerah yang partisipatif," jelasnya.

☒ Sementara itu isi butir keenam, lanjut Armuji, yakni DPRD Kota berkomitmen akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan hijau dengan menguatkan kapasitasnya agar keterlibatannya menjadi lebih produktif.

"Posisi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai subyek bukan hanya obyek mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pada evaluasi pembangunan," ujarnya.

Untuk butir ke tujuh, DPRD Kota bertekad agar sebuah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang setidaknya harus memastikan dapat mengurangi dan mencegah kerusakan lingkungan dan dampak perubahan iklim, menjaga keragaman hayati dan mengurangi kelangkaan ekologis, serta menjaga ketersediaan sumber daya alam untuk generasi masa datang.

"DPRD Kota berkomitmen secara sungguh-sungguh menjalankan fungsi pengawasannya, khususnya dalam pemberian izin harus dengan disertai syarat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar Ketua DPRD Kota Surabaya tersebut.

Acara dilanjutkan dengan kegiatan penanaman pohon sebanyak 1000 pohon dari 93 jenis tanaman yang berasal dari seluruh Indonesia. Penanaman dilakukan di taman hutan Jalan Ahmad Yani.

Hadir Walikota Bogor, Wawalkot, Sekda, unsur Muspida Kota

Bogor diantaranya, Kapolresta Bogor Kota AKBP Suyudi Ario Seto, Kepala BPN Yulia, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Jaro Ade, tim Gerakan Tanam Pohon (GTP) Kota Bogor, para tokoh masyarakat dan pelajar dari gerakan Pramuka Kota Bogor. Serta dari Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Kota Bogor.

Kumpulkan Donasi untuk Aceh

Dalam kesempatan tersebut dilakukan pula pengumpulan uang untuk membantu warga yang terkena musibah gempa di Kabupaten Pidie Jaya, Nanggroe Aceh Darusalam. Panitia Adeksi akhirnya berhasil mengumpulkan sebanyak , dana bantuan dari para penyumbang, dan dana tersebut langsung diserahkan kepada para anggota dewan yang dari Aceh.

“Inilah kepedulian kami kepada warga korban bencana alam gempa bumi di Aceh,” singkat Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono.

[pratama]